UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory)* dipandang sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. (Barus dan Setiawati, 2015)

Menurut teori keagenan (*agency theory*) adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen *and* Meckling (1976) *agency cost* itu meliputi tiga hal, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang. Biaya ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Dalam situasi

tertentu, agen mungkin untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (*bonding cost*s) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa principal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi masih dapat terjadi perbedaan antara keputusan-keputusan agen dengan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal disebut dengan *residual loss*. Dengan adanya masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang akan timbul maka diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para *stakeholders*. Untuk itu, berkembang suatu konsep yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan pemilik dan pengoperasional suatu perusahaan yang dikenal dengan konsep *Good Corporate Governance*. (Pagulung, 2011)

2.2 *Good Corporate Governance*

2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Komite *cadbulry* mendafenisikan *Corporate governance* sebagai: *Corporate governance* adalah *system* yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban pada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direktur manajer, pemegang saham, dan sebagainya**. (**Indra dan vandana, 2011).

Good Corporate Governance diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah *(value added)* untuk semua *stakeholder* nya, untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi secara akurat dan tepat waktu. Artinya semua pemegang saham tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang sama *(fairness).* Tidak ada informasi yang disembunyikan dari pemegang saham tertentu untuk kepentingan pribadi pihak-pihak lain (*transparency*). (Sulistyanto, 2008).

2.2.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Good Corporate Governance* menurut (Sutojo dan Aldridge, 2008) adalah :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga mampu menigkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.2.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut (Zarkasyi,2008) Keputusan Menteri BUMN Tahun 2002 tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran *(fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4 Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam bidang perbankan

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat *Good Corporate Governance* di bidang perbankan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang mana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah sebagai upaya perwujudan *corporate governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, maupun pemegang saham. Penguatan dewan direksi dan komisaris ini juga didukung oleh peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), di mana calon direksi dan komisaris bank harus memenuhi kompetensi tertentu untuk menjadi pengurus bank. (Indra dan Vandana, 2011).

2.2.5 Mekanisme *Corporate governance*

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/ pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005). Menurut Boediono (2005) mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*. Maka untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan *(conflict of interest)* tersebut.

Zulkafli dan Samad, 2007 (dikutip oleh Praptiningsih, 2009) mengungkapkan ada enam mekanisme *Corporate governance* yaitu : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi dan Komite Audit.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non institusional. Investor institusional diyakini mampu memonitor tindakan manajer dengan lebih baik dibanding investor individual. Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunis maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi manajemen laba. (Boediono, 2005)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*). Dengan kepemilikan yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen lebih besar. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh investor yang berasal dari pihak institusi perusahaan. Kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan mempunyai arti penting dalam memonitor manajermen dalam mengelola perusahaan. Dengan tingkat kepemilikan yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar suara dan dorongan institusi untuk melakukan pengawasan.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kencederungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. (Siregar dan Utama, 2005)

1.1 Kelebihan Investor/kepemilikan Institusional

Menurut (Boediono, 2005) Investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu:

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi.
2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Investor institusional secara umum memiliki realsi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
5. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

Adanya pemegang saham seperti institusional *ownership* memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikasi institusional *ownership* sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar.

Perubahan perilaku institusional *ownership* dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Meningkatnya aktivitas institusional *ownership* dalam melakukan monitoring disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham yang signifikan oleh institusional *ownership* telah meningkatkan kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif. Dalam waktu yang sama, biaya untuk keluar dari investasi yang mereka lakukan menjadi semakin mahal karena adanya resiko saham akan terjual pada harga diskon. Kondisi ini akan memotivasi institusional *ownership* untuk lebih serius dalam mengawasi maupun mengoreksi semua perilaku manajer dan memperpanjang jangka waktu investasi.

Dengan adanya beberapa kelebihan yang dimiliki, investor institusional diduga lebih mampu untuk mencegah terjadinya

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen laba dibanding dengan investor individual. Investor institusional dianggap lebih professional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba. Secara singkat dapat dikatakan institusional dengan manajemen laba mempunyai hubungan negatif dimana semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh korporasi maka semakin kecil kemungkinan terjadi manajemen laba (Indra dan Vandana, 2011).

2. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance*. Keberadaan komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. (Sulistyanto, 2008).

2.1 Keanggotaan Komite Audit

Komite audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota. Dipimpin oleh seorang komisaris independen. Seperti komite pada umumnya, komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, Komite audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman anggota. Sedapat mungkin anggota komite audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Agar mampu bekerja efektif, Komite audit dibantu staff perusahaan dan auditor eksternal. Komite juga harus memiliki akses langsung kepada stand dan penasehat perusahaan seperti keuangan dan penasehat hukum. Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03 PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (Bagi BUMN) komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Menurut Sarbanes-Oxley act jumlah anggota komite audit perusahaan yang dikutip (Sutojo dan Aldridge, 2008) mengharuskan bahwa:

> "Komite audit harus beranggotakan minimal tiga orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan anggota komite audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun."

Menurut Subur (2006) yang dikutip I Putu Sugiartha Sanjaya, Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota komite audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit harus memiliki keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas.
2. Anggota komite audit harus independen, objektif dan profesional.
3. Anggota komite audit harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik mengenai organisasi, lingkungan bisnis serta risiko dan kontrol.
4. Paling sedikit anggota komite audit harus memiliki pengertian yang baik tentang analisa dan penyusunan laporan keuangan.
5. Ketua komite audit harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan terampil berkomunikasi dengan baik.

Selain hal tersebut, menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menambahkan bahwa anggota komite audit tidak merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain pada periode yang sama.

2.2 Tujuan Pembentukan Komite Audit

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa tujuan pembentukan komite audit adalah :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memastikan laporan keuangan dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku secara umum
2. Memastikan bahwa kontrol internalnya memadai
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya
4. Merekomendasikan auditor eksternal

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit meningkatkan kredibilitas dan akuntanbilitas perusahaan melalui pengawasan atau proses pengendalian internal, mengawasi proses audit secara keseluruhan. Sehingga adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

2.3 Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Komite audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti yang diutarakan oleh (Sutojo dan Aldridge, 2008), yaitu:

"Mengaudit kegiatan manajemen perusahaan dan auditor (*intern* dan *ekstern*). Mereka yang berwenang meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan karyawan yang bersangkutan. Komite audit juga mengevaluasi seberapa jauh peraturan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mematuhi standar *accounting* dan prinsip akuntansi yang diterima di Australia."

Menurut (Indra dan Vandana, 2006), Komite audit memiliki wewenang, yaitu:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
2. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya;
3. Mencari Informasi yang relevan dari setiap karyawan;
4. Mengusahakan saran hukum dan profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Selain itu Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menyatakan bahwa komite audit memiliki wewenang mengakses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya serta berwenang untuk bekerjasama dengan auditor internal.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan YPPMI Institut, yang dikutip oleh (Indra dan Vandana, 2006)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*) komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*) komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris (Indra dan Vandana, 2006)

3. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajer, anggota dewan komisaris lainnya, dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* (KNKCG). Komisaris menurut *Code* tersebut, bertanggungjawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan memberikan nasihat bilamana diperlukan. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *Stakeholders* lainnya.

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Secara teori dan praktik, tugas utama dari Komisaris Independen adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka melakukan segala aktivitas

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan, serta meninggalkan keputusan yang tidak menguntungkan. Komisaris Independen merupakan inti dari *Corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. (Sulistyanto, 2008),

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Komisaris Independen minimal 50% dari anggota dewan komisaris. Komisaris independen diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Isnanta, 2008).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dewan komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan secara independen antara lain :

1. Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.
3. Dalam melakukan pengawasan, dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
7. Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan komisaris.
8. Wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
9. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham Bank.

3.1 Tanggung Jawab Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance)* didalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut (Amri, 2011) :

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Tugas Komisaris Indenpenden

Tugas Komisaris independen diatas antara lain berupa, (Amri, 2011):

1. Menjamin transparansi dan keterbukaaan laporan keuangan perusahaan.
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

3.3 Wewenang Komisaris Independen

Wewenang komisaris independen adalah, (Amri,2011) :

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ukuran Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal bank, direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, memelihara suatu struktur organisasi, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, (Purno.2013).

4.1 Tugas dan tanggung jawab dewan direksi

(Purno,2013) menyatakan dewan direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan secara independen antara lain :

1. Wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*, direksi paling kurang wajib membentuk: Satuan Kerja Audit Intern; Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
8. Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yaitu: pengaturan etika kerja; waktu kerja; dan pengaturan rapat.
9. Wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi lain dan/atau pemegang saham Bank.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

5. Kepemilikan Manajerial

Ada beberapa pengertian kepemilikan manajerial yang diuraikan beberapa peneliti, yaitu (Lemons dan Lins, 2001) dalam (Arifin, 2005) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat diartikan semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial akan menurunkan *market value*, penurunan ini akan diakibatkan karena tindakan opportunistik yang dilakukan oleh pemegang saham manajerial. (Wahidahwati, 2002) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. (Susiana dan Herawaty, 2007) menyatakan kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri direktur dan komisaris yang diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh saham yang beredar. Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan manajer tersebut bisa mengurangi adanya asimetri informasi di dalam suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi. Dengan demikian diharapkan dengan keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif meningkatkan kinerja manajer.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Ada tidaknya kepemilikan saham oleh manajemen akan mepengaruhi motivasi manajemen dalam setiap tindakan manajer. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan manajer sehingga konflik kepentingan dapat dikurangi. Selain itu, semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham yang juga termasuk dirinya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh manajemen dapat mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

(Menurut Jensen dan Meckling, 1976) dan (Morck et al.,1989) kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan bila manajer memiliki saham perusahaan yang lebih besar. Kualitas informasi yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan.

6. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance,* jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi (Purno,2013).

Ukuran dewan komisaris merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan menyulitkan dalam menjalankan peran mereka, di antaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan Ukuran Perusahaan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 *Leverage*

2.3.1 Pengertian *Leverage*

Pengertian Rasio *Leverage*: *"Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang."* (Kasmir, 2009).

Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahan harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang. (Fahmi, 2014).

Menurut (Kasmir, 2009) Ada 2 cara mengukur rasio *leverage* yaitu sebagai berikut :

a. *Debt to Asset Ratio (debt ratio)*

Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Debt\ to\ asset\ ratio = \frac{Total\ hutang}{Total\ aseet}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

Rumus untuk mencari *debt to equity* adalah sebagai berikut :

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ hutang}{Ekuitas}$$

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Tujuan *Leverage*

Menurut (Kasmir, 2009) terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiaban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap penggelolaan aktiva.

2.3.3 Manfaat *Leverage*

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* adalah menurut (Kasmir, 2009) adalah:

1. Untuk menaganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang besifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan dibiayai oleh utang.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

2.3.4 Implikasi *Leverage*

Menurut Fred Weston dalam buku (Kasmir, 2012) Rasio *leverage* memiliki beberapa implikasi berikut :

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannnya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar.

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memilki rasio *leverage* yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya resiko kerugian yang lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* lebih rendah tentu mempunyai resiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (*return)* pada saat perekonomian tinggi. (Kasmir, 2012)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

2.4.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. (Dendawijaya, 2009)

Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 bahwa setiap bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko. Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) itu sendiri merupakan rasio dalam hal kecukupan modal yang mana hal ini sangat diperlukan ketika bank dikahwatirkan akan mengalami kerugian. Bagaimanapun juga hal ini sangat mungkin terjadi kepada bank karena disebabkan oleh berbagai faktor. Ini adalah fungsi yang sebenarnya dari CAR itu sendiri yang saharusnya tetap menjadi perhatian pihak bank sejak awal berdiri.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.5 Manajemen Laba

2.5.1 Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba adalah "intervensi manjemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi" (Schipper,1989). Pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang wajar dan akurat adalah manajer. Manajer memiliki kontrol utama atas *integritas* sistem akuntansi dan catatan keuangan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Manajer juga dapat memengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung melalui pengaruh kolektif mereka dalam proses penetapan standar, Manajemen laba yaitu, memainkan laporan keuangan melalui pilihan dan perkiraan akuntansi atau mempercantik laporan keuangannya (Subramanyam dan Wild, 2014).

Schipper

Earning management is the purpose intervention in the eksternal financial reporting process, with the intent of obtaining same private gain (a opposed to say, merely faciliting the neutral operation of the purpose (manajemen laba adalah proses campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses. (Sulistyanto, 2008)

Manajemen laba (*Earning Management*) adalah potensi manajemen akrual untuk memperoleh keuntungan. Upaya perusahaan atau

pihak-pihak tertentu untuk merekayasa, memanipulasi informasi, bahkan melakukan tindakan manajemen laba yang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai fundamentalnya, karena laporan keuangan seharusnya berfungsi sebagai media komunikasi manajemen dengan pihak eksternal atau antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.

Tindakan manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuan memanipulasi besaran laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka yang dihasilkan. Terdapat berbagai motivasi yang melatarbelakangi manajer dalam melakukan praktik manajemen laba. Seperti yang dikemukakan oleh Scott, 2003 dalam Yamadita 2014, menyatakan berbagai motivasi manajer perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus Plan*

   Manajer mempunyai informasi laba bersih sebelum dilaporkan dalam laporan keuangan, sementara pihak luar tidak bisa mengetahuinya sampai mereka membaca laporan keuangan. Karenanya manajer akan berusaha untuk mengatur laba bersih tersebut sehingga dapat memaksimalkan bonus mereka berdasarkan compensation plans perusahaan. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh oleh manajer

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengendalikan laba, yaitu: mengendalikan *accruals*, yaitu meliputi penghasilan *(revenue)* dan beban *(expenses)* dalam perhitungan rugi yang tidak mempengaruhi cash flowsdan dengan merubah kebijakan akuntansi.

2. *Debt Convenant*

Kontrak hutang jangka panjang merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman lender atau kreditor dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikan risiko) bagi kreditur yang telah ada. Kontrak inididasarkan pada pada teori akuntansi postif (PAT), yakni hipotesis debt convenant, yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang, manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat "memindahkan" laba periode mendatang ke periode berjalan.

3. *Political Motivation*

Aspek politis tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya perusahaan besar dan industri strategi karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. Beberapa motivasi politis yang mendorong perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba antara lain (a) untuk mengurangi biaya politis dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dari pemerintah, (b) untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, misalnya subsidi, perlindungan dari pesaing luar negeri, dan untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh.

4. *Taxation Motivation*

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Sebagai contoh, untuk persediaan, perusahaan akan memilih metode akuntansi LIFO, yang menghasilkan laba bersih paling rendah dibandingkan metode lainnya.

5. Pergantian CEO

Beragam motivasi timbul di sekitar pergantian CEO. Sebagai contoh, CEO yang mendekati masa akhir penugasan atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya dan membuat CEO yang baru merasa sangat berat untuk mencapai tingkat laba tersebut. Demikian juga dengan CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pencatatannya.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Pada hakikatnya, perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya di pasar modal belum mempunyai harga pasar sehingga memiliki masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Oleh karena itu, untuk tawar menawar, informasi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan yang terdapat dalam prospektus merupakan sumber informasi yang sangat berguna. Secara analitikal, informasi seperti laba bersih dapat dibagi sebagai sinyal kepada investor tentang "nilai" perusahaan. Jadi, hal ini memunculkan kemungkinan bahwa pihak manajemen perusahaan yang go public melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya.

Dan menurut Scoot, 2006 dalam Yamadita, 2014, teknik untuk merekayasa laba dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah metode akuntansi, dan menggeser periode biaya atau pendapatan. Terdapat empat pola manajemen laba yang dapat dilakukan, yaitu :

1. *Taking a bath* yaitu pola yang dapat terjadi selama reorganisasi dan juga pada periode penempatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dengan jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan di masa mendatang.
2. *Income minimization* yaitu pola minimisasi laba yang dipilih untuk alasan politis perusahaan selama perusahaan berada pada periode kenaikan laba yang cukup drastis. Contoh : penghapusan aset tetap berwujud dan tidak berwujud, pengakuan sebagai biaya atas pengeluaran research and development dan iklan.
3. *Income maximization*, yaitu yang dilakukan manajer saat laba perusahaan di bawah *bogey* dengan tujuan memperoleh bonus. Selain

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, perusahaan yang dekat dengan pelanggaran perjanjian hutang dapat memungkinkan untuk memaksimalkan laba.

Income smoothing, yaitu pola yang dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil Scott, 2006 dalam Yamadita, 2006. Laporan keuangan merupakan alat untuk mengetahui posisi dan kemajuan perusahaan dipandang dari sudut keuangan. Laporan keuangan menunjukkan sampai seberapa efisien pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan. Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu.

2.6 Pandangan Islam yang Terkait dengan Penelitian

Adapun landasan akuntansi atau pencataan keuangan yang digunakan dalam islam yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu :

يَا ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة:٢٨٢)

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah : 282)

Maksud dari ayat diatas adalah menjelaskan tentang proses dari akuntansi yaitu pencatatan dan pemberian informasi berupa jual beli, hutang piutang yang merupakan bagian dari laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Seorang manajer hendaknya jangan lah menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih keuntungan diri sendiri dengan melibatkan banyak orang yang menjadi bawahan nya. Seoramg manajer dituntut untuk berprilaku jujur dan adil karena seorang pemimpin hendaknya mampu mensejahterakan banyak orang bukan memperkaya diri sendiri.

2.7 Penelitian terdahulu

Penelitian yang berkaitan tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) , *leverage* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Manajemen Laba telah banyak dilakukan, diantaranya seperti yang tertera pada tabel berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Publikasi	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Hikmah Is'ada Rahmawati	Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Sektor Perbankan	Accounting Analysis Journal 2 (1) (2013)	Variabel Independen Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Variabel Dependen Manajemen Laba	Analisis Linear Regresi Berganda	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, Dan Kepemilikan Manajerial Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba. Secara Parsial Hanya Dewan Komisaris Independen Yang Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba. Sementara Komite Audit Independen Dan Kepemilikan Manajerial Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.
2	Ni Wayan Nariastiti Ni Made Dwi Ratnadi	pengaruh asimetri informasi, *Corporate governance* dan ukuran perusahaan pada manajemen laba	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.3 (2014) : 717-727	Independen : Asimetri informasi *Corporate Governance* Ukuran perusahaan Dependen : Manajemen laba	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asimetri informasi berpengaruh positif pada manajemen laba. *Corporate governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada manajemen laba.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Dian Agustia	Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance*, *Free Cash Flow*, dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 15, No. 1, Mei 2013, 27-42	Independen : *Good Corporate Governance* Free cash flow *Leverage* Dependen : Manajemen laba	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel-variabel *Good Corporate Governance (GCG)* tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Variabel *free cash flow* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. *Leverage ratio* berpengaruh terhadap *earnings management*.
4	Iketut Gunawan, Nyoman Ari Surya Darmawan, I Gusti Ayu Purnamawati	pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *Leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI)	e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 03, No.01 Tahun 2015)	Independen : Ukuran perusahaan Profitabilitas *Leverage* Dependen : Manajemen laba	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
5	R. Anastasia Endang Susilawati Nanang Purwanto	pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba perbankan yang terdaftar di BEI	Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) ISSN: 2337-56xx. Volume: xx, Nomor: xx	Independen : *Good Corporate Governance* *Leverage* Ukuran perusahaan Dependen : Manajemen laba	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG *(Good Corporate Governance)* dengan organ khusus kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan ukuran komite audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, namun secara parsial hanya komite audit yang

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

						berpengaruh terhadap manajemen laba. *Leverage* perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. GCG, *Leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
6	Robert Jao Gagaring Pagalung	*Corporate Governance*, ukuran perusahaan, dan *Leverage* terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur Indonesia	Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 1/November 2011: 1-94	Independen : *Corporate Governance* Ukuran perusahaan *Leverage* Dependen : Manajemen laba	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Corporate governance* melalui kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, dan jumlah pertemuan komite audit mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap manajemen laba. *Leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
7	Luh Made Dwi Parama Yogi	Pengaruh Arus Kas Bebas, *Capital*	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana	Variabel Independent	Analisis Regresi Berganda	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Arus Kas Bebas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

	Gusti Ayu Eka Damayanthi	*Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Good Corporate Governance* Pada Manajemen Laba	Vol.15.2. Mei (2016)	Arus Kas Bebas, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Good Corporate Governance* Variabel Dependent Manajemen Laba		Berpengaruh Negatif Pada Manajemen Laba. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Berpengaruh Positif Pada Manajemen Laba. *Good Corporate Governance* (GCG) Yang Diproksi Dengan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Tidak Berpengaruh Pada Manajemen Laba.
8	Santhi Yuliana Sosiawan	pengaruh kompensasi, *Leverage*, ukuran perusahaan, *earnings power* terhadap manajemen laba	JRAK, Volume 8, No.1 Februari 2012	Independen : Kompensasi *Leverage* Ukuran perusahaan *Earning power* Dependen : Manajemen laba	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya tingkat rasio leverage dan *earnings power* perusahaan berpengaruh terhadap terjadinya tindak manajemen laba
9	Rice	pengaruh rasio keuangan dan *Corporate governance* terhadap praktik manajeman laba pada perusahaan kompas100	*jwem stie mikroskil* 81 jurnal wira ekonomi mikroskil volume 3, nomor 02, oktober 2013	Independen : Rasio keuangan *Corporate Governance* Dependen : Manajemen laba	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel *net profit margin, debt to assets ratio*, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik Manajemen Laba

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Izzati Amperaningrum Intan Komala Sari	pengaruh *Good Corporate Governance*, leverage dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba (studi kasus pada Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5 Oktober 2013	Independen : *Good Corporate Governance* *Leverage* Kinerja keuangan Dependen : Manajemen laba	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial *Good Corporate Governance* dan *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba Secara simultan ada pengaruh secara signifikan antara *Good Corporate Governance*, leverage, dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah penting. Beberapa faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba diantaranya adalah Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, *Leverage*, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Sistem monitoring perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Cornett *et al.*, 2009). Pihak institusi yang memiliki proporsi saham pada suatu perusahaan akan meningkatkan sistem pengawasannya pada kinerja manajemen untuk meminimalisir tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin dapat terjadi (Boediono, 2005).

Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit sehingga komite audit mampu mengawasi perilaku manajer sehingga mengurangi penyimpangan yang dilakukan manajer dalam laporan keuangan. Selain itu sulistyanto juga mengatakan komite audit mempunyai hubungan positif dengan level manajemen laba. selain itu, kompetensi anggota komite audit ternyata juga mempunyai hubungan dengan menurunnya kemungkinan dilakukannya menejemen laba. Atau dengan kata lain, semakin kompeten komite audit akan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semakin mengurangi kemungkinan aktivitas manajemen laba. (Sulistyanto, 2008)

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang *reliable*. Oleh sebab itu, keberadaan dewan ini akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa keuangan yang dilakukan seorang manajer. Ada alasan logis mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu dewan komisaris yang indepedensi secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mempengaruhi kemungkinan penyimpangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajer.

Investor untuk melihat kemampuan dan resiko perusahaan, salah satunya dengan *Leverage* rasio. Penggunaan *debt to aset ratio* sebagai proksi variabel *leverage ratio*. Perusahaan yang memiliki rasio hutang relatif tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi ketika perekonomian berada pada kondisi yang normal, namun memiliki resiko kerugian ketika ekonomi mengalami resesi. Pada saat ekonomi mengalami resesi dan perusahaan mengalami resiko kerugian disitulah peran manajer untuk melakukan manajemen laba agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian (Brigham dan Houston, 2010)

Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan dapat memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba agar memeroleh nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standar kesehatan bank, sebagai sinyal bahwa bank berada dalam kategori sehat. Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan laba. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah modal sendiri, sehingga dapat digunakan untuk mengelola aktiva yang ada. Perputaran aktiva tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan laba (Arriela, 2013).

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis berikut menyajikan kerangka pemikiran yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

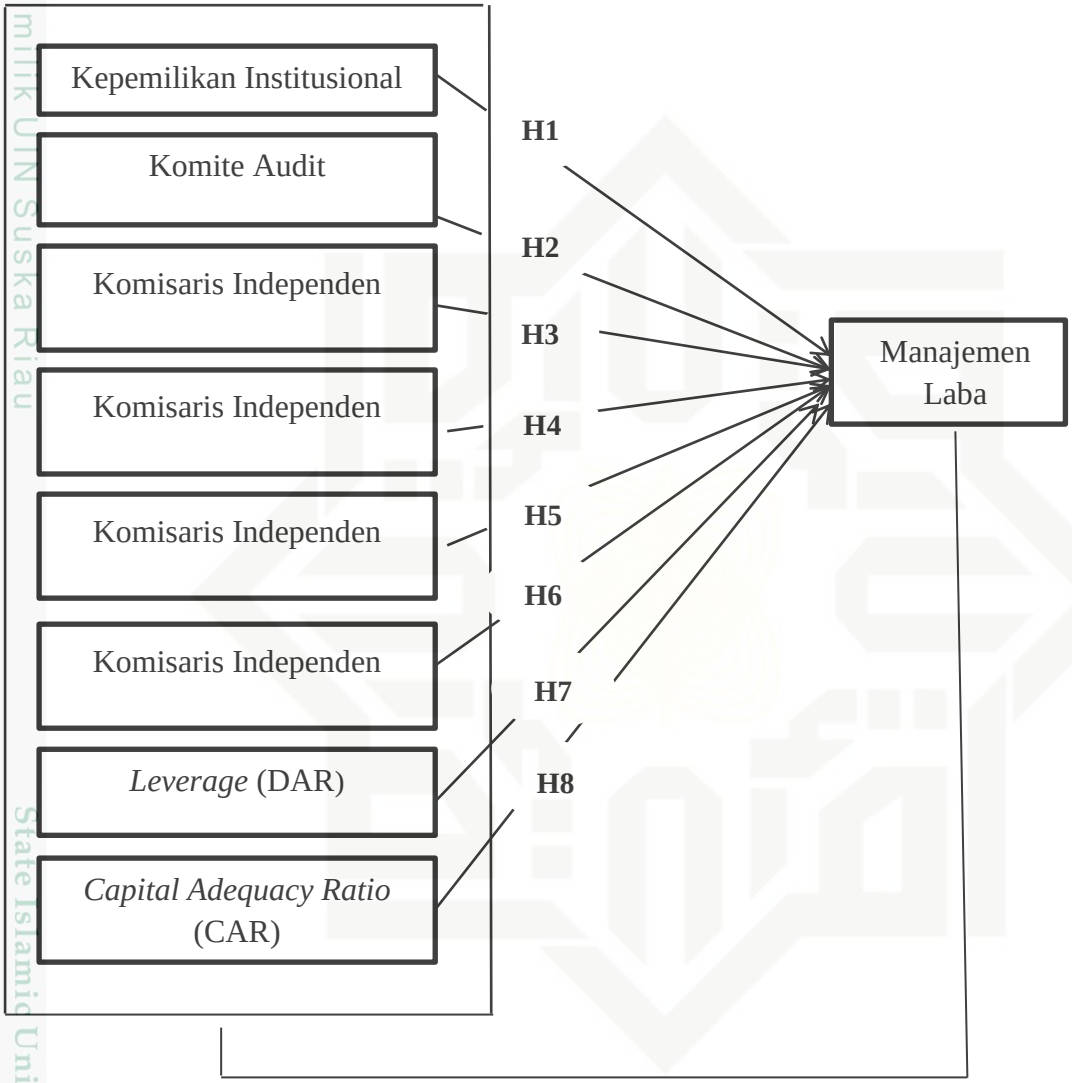

2.9 Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap manajemen laba

Sistem monitoring perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Cornett *et al.*, 2009). Pihak

institusi yang memiliki proporsi saham pada suatu perusahaan akan meningkatkan sistem pengawasannya pada kinerja manajemen untuk meminimalisir tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin dapat terjadi (Boediono, 2005). Hasil penelitian (Welvin, 2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *discretionary accrual* sehingga kepemilikan saham oleh investor institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku oportunistik manajemen. Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2. Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit sehingga komite audit mampu mengawasi perilaku manajer sehingga mengurangi penyimpangan yang dilakukan manajer dalam laporan keuangan. Selain itu sulistyanto juga mengatakan komite audit mempunyai hubungan positif dengan level manajemen laba. selain itu, kompetensi anggota komite audit ternyata juga mempunyai hubungan dengan menurunnya kemungkinan dilakukannya menejemen laba. Atau dengan kata lain, semakin kompeten komite audit akan semakin mengurangi kemungkinan aktivitas manajemen laba. (Sulistyanto, 2008)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution dan Setiawan (2007) membuktikan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan perbankan mampu mengurangi manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memenuhi tanggung jawabnya, diantaranya memastikan jalannya perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, operasi perusahaan telah dijalankan secara beretika dan pengawasan yang efektif terhadap konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan telah dilakukan. Wedari (2008) juga membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *discretionary accrual*. Hal ini berarti secara rata-rata aktivitas manajemen laba pada perusahaan yang memiliki komite audit lebih rendah daripada perusahaan yang tidak memiliki komite audit.. Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_2 : Diduga Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3. Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Komisaris Independen merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang *reliable*. Oleh sebab itu, keberadaan dewan ini akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa keuangan yang dilakukan seorang manajer. Ada alasan logis mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu dewan komisaris yang indepedensi secara umum mempunyai

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mempengaruhi kemungkinan penyimpangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajer. (Sulistyanto, 2008) menyatakan ada hubungan negatif antara proporsi independensi dewan komisaris dengan level manajemen laba. Demikian juga kompetensi dewan komisaris yang mempunyai hubungan negatif dengan level manipulasi. Atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris, semakin mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Secara Parsial Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba. (Hikmah, 2013). Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_3 : Diduga komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4. Ukuran Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba

Dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal bank, direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, memelihara suatu struktur organisasi, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corporate Governance bagi Bank Umum. Oktaviani Dwi (2015) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Iqbal dan Fachriyah (2008) menyakatan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba, penelitian tersebut mengindikasi bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi, maka akan semakin menekan terjadinya manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_4 : Diduga Ukuran Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

5. Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajer, direksi, komisaris, maupun pihak lain yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan membagi saham yang dimiliki manajemen dengan seluruh jumlah saham perusahaan (Ujiyantho 2007). Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Dengan demikian, struktur modal dengan kepemilikan manajemen yang tinggi mampu menurunkan biaya keagenan (Saputri,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2010). Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat diterapkan untuk meminimalisir konflik keagenan yang berakibat pada munculnya tindakan *earnings management* oleh manajer. Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_5 : Diduga Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6. Ukuran dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Ukuran dewan komisaris merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan menyulitkan dalam menjalankan peran mereka, di antaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan Ukuran Perusahaan Penelitian yang dilakukan (Nasution dan Setiawan, 2007) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2009) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kemungkinan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_6 : Diduga Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh Positif terhadap manajemen laba Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi

7. *Leverage* terhadap manajemen laba

Investor untuk melihat kemampuan dan resiko perusahaan, salah satunya dengan *Leverage ratio*. Penggunaan *debt to aset ratio* sebagai proksi variabel *Leverage ratio*. Perusahaan yang memiliki rasio hutang relatif tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi ketika perekonomian berada pada kondisi yang normal, namun memiliki resiko kerugian ketika ekonomi mengalami resesi. Pada saat ekonomi mengalami resesi dan perusahaan mengalami resiko kerugian disitulah peran manajer untuk melakukan manajemen laba agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian (Brigham dan Houston, 2010)

Perusahaan yang memiliki *financial leverage* tinggi, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam *default*, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utang pada waktunya. Keadaan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki pengawasan yang lemah terhadap manajemen yang menyebabkan manajemen dapat membuat keputusan sendiri, dan juga menetapkan strategi yang kurang tepat. Kurangnya pengawasan selain menyebabkan *leverage* yang tinggi juga akan meningkatkan perilaku oportunis

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manajemen seperti melakukan manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik.

Penelitian (Agustia, 2013), dan (Sosiawan, 2012) menemukan bahwa *leverage* mempunyai hubungan positif dengan manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_7: Diduga *Leverage* berpengaruh Positif terhadap manajemen laba Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

8. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Manajemen Laba

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas sehingga akan lebih sedikit kemungkinan manajer melakukan kecurangan.

Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan dapat memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba agar memeroleh nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai standar kesehatan bank, sebagai sinyal bahwa bank berada dalam kategori sehat. Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan laba. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah modal sendiri, sehingga dapat digunakan untuk

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengelola aktiva yang ada. Perputaran aktiva tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan laba (Arriela, 2013).

Bertrand, 2000 dalam (Luh Made, 2016) telah melakukan penelitian dan diperoleh bukti secara empiris bahwa bank di Swiss yang mendekati ketentuan batasan kecukupan modal cenderung untuk meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mereka agar memenuhi persyaratan dengan cara melakukan manajemen laba.

Salah satu faktor dominan yang mendorong bank melakukan pengelolaan laba adalah motif meningkatkan kinerja bank. Penelitian (Zahara dan Veronica, 2009) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Berpengaruh Positif terhadap Manajemen Laba. Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_8 : Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh Positif terhadap manajemen laba Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

9. Pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, *Laverage* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Manajemen Laba

Pihak institusi yang memiliki proporsi saham pada suatu perusahaan akan meningkatkan sistem pengawasannya pada kinerja manajemen untuk meminimalisir tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin dapat terjadi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Boediono, 2005). komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit sehingga komite audit mampu mengawasi perilaku manajer sehingga mengurangi penyimpangan yang dilakukan manajer dalam laporan keuangan (Sulistyanto, 2008). Komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang *reliable*. Oleh sebab itu, keberadaan dewan ini akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa keuangan yang dilakukan seorang manajer (Sulistyanto, 2008).

Dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal bank, direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, memelihara suatu struktur organisasi, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian internal. Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Dengan demikian, struktur modal dengan kepemilikan manajemen yang tinggi mampu menurunkan biaya keagenan (Saputri, 2010). Ukuran dewan komisaris merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Semakin banyaknya anggota dewan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komisaris maka akan menyulitkan dalam menjalankan peran mereka, di antaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan.

Perusahaan yang memiliki rasio hutang relatif tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi ketika perekonomian berada pada kondisi yang normal, namun memiliki resiko kerugian ketika ekonomi mengalami resesi. Pada saat ekonomi mengalami resesi dan perusahaan mengalami resiko kerugian disitulah peran manajer untuk melakukan manajemen laba agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian (Brigham dan Houston, 2010).

Nilai CAR yang tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan dapat memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba agar memeroleh nilai CAR sesuai standar kesehatan bank, sebagai sinyal bahwa bank berada dalam kategori sehat. Nilai CAR yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan laba. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah modal sendiri, sehingga dapat digunakan untuk mengelola aktiva yang ada. Perputaran aktiva tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan laba (Arriela, 2013).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian (Izzati, 2013) menyatakan bahwa GCG *(Good Corporate Governance*), *Laverage*, dan CAR (*Capital Adequacy Ratio)* berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba sektor perbankan. Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_9 : Pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, *Laverage* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Manajemen Laba

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.